

ISSN: 9772442302110

THE EQUATOR

Vol. 5/No. 3
Juli - September 2017
Terbitan triwulan | GRATIS

Newsletter
Yayasan Biennale Yogyakarta

BERHADAP-HADAPAN DENGAN KEKACAUAN



9 772442 302110

PENGANTAR REDAKSI

Para pembaca yang baik.

Biennale Jogja XIV Equator #4 sudah di depan mata. Serangkaian aktivitas yang kami gelar dalam perhelatan ini akan mulai diselenggarakan pada bulan Oktober, dan akan terus berlangsung hingga Desember. Kami tak sabar, energinya begitu besar. Segala sesuatu sedang disiapkan dan tentunya bolehlah Anda sekalian ikut memantau dan berperan serta.

"The Equator" edisi ini adalah terbitan ketiga di tahun 2017. Edisi kali ini mencoba mendiskusikan salah satu poin turunan dari tema Biennale Jogja XIV, **STAGE OF HOPELESSNESS**, yang berkaitan dengan kekacauan dan keputusan. Kedua hal ini tak mungkin luput dari keseharian manusia di mana pun berada. Akan tetapi, kekacauan dan keputusan bukanlah hal yang gampang dihadapi. Sering kali, keduanya terus dinafikan supaya seakan-akan hidup berjalan lancar dan baik-baik saja. Meski demikian, selalu ada saatnya di mana kekacauan tidak lagi dapat dihindari dan individu harus berhadap-hadapan dengannya secara nyata.

Terbitan ini akan menyajikan beberapa cerita tentang bagaimana rasanya mengalami peristiwa berhadap-hadapan dengan atau setidaknya menyadari kekacauan dan keputusan itu. Kisah-kisah itu dihadirkan lewat beberapa sudut pandang yang memungkinkan kita kemudian mempertimbangkan seperti apa realitas macam itu akan kita pahami, atau bahkan namai.

Tulisan pertama dihadirkan oleh seorang sahabat yang kami temui saat kunjungan ke Brasil, yakni Pastor Fernando Doren, SVD. Ia menceritakan bagaimana memandang stigma buruk terkait kekacauan yang dilekatkan pada penjara. Dari pengalamannya mendampingi para narapidana, kisahnyamemotret bagaimana kemanusiaan para narapidana dipersepsi dan dibentuk oleh kondisi penahanan itu sendiri. Ia mencatat bahwa ruang bernama penjara itu tidaklah sepenuhnya berisi kekacauan dan keputusan.

Tulisan kedua, kebetulan masih berkulat di seputar topik penjara, disajikan oleh A. Harimurti, yang sempat meneliti tentang kasus pembantaian Cebongan, yang sempat ramai sekitar tahun 2013 silam di Yogyakarta. Ia membingkai kisah kekacauan ini dalam persoalan seputar citra pahlawan yang justru disematkan pada mereka yang dianggap tidak taat pada aturan hukum. Selanjutnya, kami memuat sebuah catatan reflektif pribadi dari seorang penulis lagu dan musisi dari skena musik independen Yogyakarta, Sabina Thipani, tentang pengalamannya melagukan realita yang tidak manis. Ia mengisahkan pula pergulatan saat lagu-lagu yang ditulisnya, yang berangkat dari kekacauan serta kemarahan akan kenyataan, secara tidak sengaja berhadap-hadapan langsung dengan para pihak yang dilagukan dan punya andil dalam kekacauan itu.

Selain ketiga tulisan di atas, Muhammad Abe, anggota Tim Riset BJ XIV juga membagikan ceritanya berkunjung ke Brasil dalam rangka mempersiapkan kemitraan untuk perhelatan Biennale Jogja XIV. Tak lupa, kami sampaikan pula tema program dan kuratorial yang diusung Biennale Jogja XIV kali ini.

Semoga sajian edisi ini mendapat ruang di benak para pembaca sekalian, untuk menginisiasi dialog lebih lanjut tentang tiap-tiap situasi kacau dalam masyarakat yang pernah kita hadapi.

Salam,
Redaksi

The Equator merupakan newsletter berkala setiap tiga bulan diterbitkan Yayasan Biennale Yogyakarta. Newsletter ini dapat diakses secara online pada situs:
www.biennalejogja.org

Redaksi The Equator menerima kontribusi tulisan dari segala pihak sepanjang 1500 - 2000 kata dengan tema

terkait isu Nusantara Khatulistiwa. Tulisan dapat dikirim via e-mail ke: the-equator@biennalejogja.org. Tersedia kompensasi untuk tulisan yang diterbitkan.

Tentang Yayasan Biennale Yogyakarta (YBY)
Misi YBY adalah:
Menginisiasi dan memfasilitasi berbagai

upaya mendapatkan konsep strategis perencanaan kota yang berbasis seni budaya, penyempurnaan *blue print* kultural kota masa depan sebagai ruang hidup bersama yang adil dan demokratis. Berdiri pada 23 Agustus 2010.

Alamat:
Taman Budaya Yogyakarta
Jl. Sri Wedani No.1 Yogyakarta

Telp: +62 274 587712
E-mail:
the-equator@biennalejogja.org
Juli - September 2017, 1000 exp

Penanggung jawab: Direktur Biennale Jogja XIV Equator #4
Redaktur Pelaksana: Maria Puspitasari
Kontributor: Fernando Doren, A. Harimurti, Muhammad Abe, Sabina

DAFTAR ISI



4| Penjara dan Manusianya: Antara Institusi Penghukum dan Lembaga Pemasyarakatan

Rm. Ferdinand Doren, SVD
(Misionaris asal Flores, NTT, bekerja di São Paulo, Brasil.
Staf Pengajar Sekolah Tinggi Teologi Katolik São Paulo)



10| Kalau Pembantai Jadi Pahlawan Tidak Mau Tahu Atau Tidak Tahu Malu?

A. Harimurti (Peneliti di Lembaga Studi Realino)



18| Kekacauan Ini

Sabina Thipani (Penulis lagu, bermusik bersama *band* Agoni)



24| Catatan dari São Paulo dan Rio

Muhammad Abe (Tim Riset dan Basis Data Biennale Jogja XIV)

30| BIENNALE JOGJA XIV EQUATOR #4: STAGE OF HOPELESSNESS

Indonesia Bertemu Brasil | 2 November – 10 Desember 2017

Thipani
Fotografi: Arsip YBY, kontributor,
sumber-sumber internet
Foto sampul: A. Harimurti
Desainer: Yohana T.
Outlet Penyebaran Jakarta
Ruangrupa, Goethe Institut,
Komunitas Salihara, dia.lo.gue, Kedai
Tjikini, Serrum
Bandung: Selasar Sunaryo Art Space,

Galeri Soemardja, Tobucil
Jawa Barat: Jl. RA. Natamanggala,
Perum Bukit Rantau Indah C27
Kademangan Pasir Halang Kec.
Mande Kab. Cianjur
Yogyakarta: IVAA, Kedai Kebun,
Perpustakaan UIN Yogyakarta,
Perpustakaan Pusat UGM,
Perpustakaan Pascasarjana USD,
Cemeti Art House, LKIS, Ark Gallerie,

Warung Lidah Ibu, FSR ISI, Jogja
Contemporary, PKKH UGM,
Angkringan Mojok
Semarang: Kolektif Hysteria
Surabaya: C2O
Kediri: RUPAKATADATA Jokosaw
Koentono
Bali: Ketemu Project Space
Makasar: Rumata Artspace, Colliq
Puji'e

Dukungan untuk Yayasan Biennale
Yogyakarta dikirim ke:
Yayasan Biennale Yogyakarta
BNI 46 Yogyakarta
No.rek: 224 031 615
Yayasan Biennale Yogyakarta
BCA Yogyakarta
No.rek: 0373 0307 72
NPWP: 03.041.255.5-541.000



Kalau Pembantai Jadi Pahlawan Tidak Mau Tahu atau Tidak Tahu Malu? ¹

A. Harimurti (Peneliti di Lembaga Studi Realino)

Delapan belas tahun setelah pembantaian 1965, terjadi Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) yang dikenal sebagai Petrus (Penembak[an] Misterius). Operasi ini berawal dari Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Komandan Kodim 0734, Letkol M. Hasbi, untuk kemudian merambah ke kota-kota besar seperti Solo, Bandung, Jakarta, dan Medan dari bulan Maret 1983 hingga tahun 1984.² Lima belas tahun setelah reformasi, peristiwa pembantaian yang melibatkan militer dengan pola yang berbeda kembali terjadi.

Dukungan untuk Kopassus dan pelabelan citra preman pada "musuhnya" di Pengadilan Militer II Yogyakarta, 5 September 2013.

Dok: A. Harimurti

Pada tanggal 23 Maret 2013, Lembaga Pemasyarakatan Cebongan diserang oleh sekelompok orang yang kemudian teridentifikasi sebagai anggota Kopassus (Komando Pasukan Khusus). Serangan tersebut menewaskan empat tahanan kasus pembunuhan terhadap seorang anggota Kopassus, Sersan Kepala (Serka) Heru Santoso, yakni Hendrik Benyamin Angel Sahetapi

alias Diki Ambon (31 tahun), Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33 tahun,) Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu alias Adi (29 tahun), dan Yohanes Juan Manbait alias Juan (38 tahun). Meskipun demikian, pembantaian ini justru diikuti dengan kemunculan dukungan oleh elemen masyarakat di Yogyakarta yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Keistimewaan (Sekber Keistimewaan). Perayaan pembantaian ini dilakukan lewat eksploitasi istilah “preman” untuk menyebut para tahanan yang mati dibantai. Para korban pembantaian ditempatkan sebagai pihak yang tidak bermoral dan layak untuk dibantai. Bahkan, para pembantai justru dielu-elukan sebagai kesatria yang menyelamatkan masyarakat Yogyakarta dari aksi premanisme.

Mengapa pembantaian-pembantaian yang melibatkan militer terjadi berulang di Yogyakarta? Mengapa pembantaian Cebongan memperoleh dukungan sekaligus pengabaian dari sebagian kalangan warga Yogyakarta? Mengapa muncul dalih bahwa kriminalitas di Yogyakarta meningkat sebelum terjadi pembantaian dan menurun setelahnya? Mengapa pembantaian Cebongan menegaskan bahwa Yogyakarta memang sebenarnya istimewa sehingga keamanan dan ketenteramannya perlu dijaga? Tulisan ini berminat untuk menjawab mengapa pembantaian Cebongan justru diceritakan sebagai kisah kepahlawanan.

Penyingkiran para korban pembantaian Cebongan muncul dalam wacana preman kontra pahlawan. Para korban yang dilabeli preman diasosiasikan dengan para pendatang asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyingkiran ini bisa dijelaskan

lewat alam pikir fantasmatik gerakan pendukung pelaku pembantaian maupun para pelaku pembantaian. Sebab itu, sebelum menjawab pertanyaan yang telah disebut sebelumnya, perlulah dijabarkan singkat soal fantasi gerakan pro-Kopassus dalam pembantaian ini.

Setidaknya, ada empat bentuk fantasi yang mendasari terjadinya dukungan terhadap pembantaian. Pertama berkaitan dengan pelaku pembantaian yang difantasi sebagai pahlawan, yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini. Kedua adalah fantasi mengenai pembelaan kepentingan orang banyak, yang dalam hal ini terkait dengan ‘jiwa korsa’, yakni istilah militer untuk membela dan bersolidaritas terhadap sesama anggota korps. Kedua fantasi yang berkaitan dengan pelaku pembantaian didukung dengan formasi fantasi ketiga yang berkaitan dengan pendatang yang secara khusus merujuk pada para “preman” asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Lantas, bentuk fantasi keempat dapat ditemukan dalam kaitannya dengan bagaimana menjadi subjek Yogyakarta yang ideal menurut gerakan pendukung pembantaian, yakni subjek yang *njawani*.³ Meskipun demikian, fantasi mengenai subjek ideal ini berlangsung bukan hanya saat riuhnya wacana pembantaian Cebongan, namun juga dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Ketika berbicara soal mengapa sebuah tindakan pembantaian diceritakan sebagai sebuah kisah kepahlawanan, pertanyaan pertama yang mungkin muncul adalah: Apakah pembantai ini memang pahlawan? Sebagai sebuah istilah yang butuh kesepakatan dalam dunia simbolik, pertama-tama mestilah disadari bahwa seorang pahlawan menjadi benar-benar



pahlawan ketika orang-orang memperlakukannya lainnya pahlawan. Orang tersebut tidak menjadi pahlawan semenjak lahir, melainkan ia menduduki tempat pahlawan dalam rangkaian hubungan sosio-simbolik. Masyarakat dianggap sebagai subjek yang diandaikan percaya bahwa mereka adalah pahlawan. Pahlawan ini mampu menggantikan masyarakat Yogyakarta untuk melakukan tindakan primitif yang melibatkan fisik sehingga orang lainnya mendapatkan ruang untuk menikmati kebebasannya (*primordial substitution*). Awalnya, para pelaku pembantaian tidak diperlakukan layaknya pahlawan. Bahkan sebaliknya, sebelum para pelaku teridentifikasi sebagai anggota Kopassus, mereka dinyatakan sebagai pengacau yang menebar teror. Tidak bisa dimungkiri bahwa pertanyaan-pertanyaan di atas berujung pada: mengapa terjadi alih-ubah dari pembuat teror menjadi pahlawan?

Pahlawan dalam pembantaian Cebongan merupakan sosok yang mengalami mistifikasi. Bahkan, para pembantai justru ditempatkan

Dukungan untuk
Kopassus dan pelabelan
citra preman pada
"musuhnya" di
Pengadilan Militer II
Yogyakarta, 5 September
2013.

Dok: A. Harimurti

sebagai penyelamat yang mendatangkan berkah dengan membuat Yogyakarta menjadi aman. Tidak diketahui kapan muncul, namun membawa aman, nyaman, damai, dan tenteram. Pahlawan dalam wacana seputar pembantaian Cebongan ini berada dalam momen saat Yogyakarta membutuhkan “tokoh, entah perorangan entah institusi, yang bisa menyelamatkan Jogja dari kriminalitas”.⁴ Meskipun demikian, tindak kriminalitas yang meningkat tajam, yakni 193,98% pada tahun 2014,⁵ menunjukkan bahwa pembantaian Cebongan bukannya mengatasi kriminalitas di Yogyakarta.

Perlu dicatat bahwa gagasan balas dendam yang dilakukan prajurit Kopassus, yakni Sersan Dua (Serda) Ukok dkk., awalnya dilihat sebagai bentuk kriminalitas. Namun, ketika mendapatkan dukungan, balas dendam ini menjadi sesuatu yang terampuni—bahkan sesuatu yang lumrah-lumrah saja. Terjadi perubahan makna sosial ketika aksi balas dendam ini ditempatkan dalam sebuah konteks individu dan kemudian menjadi aksi kolektif. Sesuatu yang tadinya tabu menjadi prestasi heroik atau bahkan kewajiban mulia seorang prajurit yang mengangkat tinggi jiwa korsa mereka.⁶

Setidaknya ada dua kategori penting terkait dengan peristiwa pembantaian dan dukungan yang mengikuti, yakni keistimewaan dan jiwa korsa.⁷ Menjadi Yogyakarta yang aman, nyaman, damai, dan tenteram mewakili apa yang dinamakan oleh gerakan pendukung pembantaian Cebongan sebagai keistimewaan. Sementara “kesatria [yang] telah mengakui perbuatannya” dan “siap mempertanggungjawabkan apa pun risiko

atas dasar kehormatan prajurit ksatria” mewakili apa yang disebut sebagai jiwa korsa-nya Kopassus. Keduanya berpadu membentuk sebuah introyeksi⁸ mengenai bagaimana Yogyakarta menjadi ‘Yogyakarta’ simbolik atau Yogyakarta-yang-ideal. Introyeksi ini menciptakan sebuah moralitas paling tinggi yang mengganti dan meruntuhkan sistem moralitas umum demi kepentingan Yogyakarta.⁹

Bagaimana dengan jiwa korsa sendiri? Pendefinisian dan munculnya konsep preman dihadapkan dengan jiwa korsa—yang didefinisikan sebagai semangat untuk “membantu, melindungi, berbagi, mengingatkan, menjaga [atau] dengan kata lain senasib, sepenanggungan untuk bersama dalam satu unit memenangkan pertempuran.”¹⁰ Frasa “dalam satu unit memenangkan pertempuran” mengindikasikan bahwa jiwa korsa merupakan sentimen solidaritas kelompok. Penggunaan istilah jiwa korsa menunjukkan bahwa terdapat retakan dalam ruang sosio-simbolik yang memungkinkan jiwa korsa ditafsir sesukanya dan menjadi penanda mengambang yang bisa diisi berdasarkan kepentingan pihak penafsir. Retakan inilah yang memungkinkan jiwa korsa melumrahkan apa yang di depan moralitas kebanyakan dinilai salah. Orang dengan mudah akan berpikir bahwa penyerangan Lapas Cebongan tidak direncanakan¹¹ atau perbuatan pelaku merupakan respons atas pembacokan Sersan Satu (Sertu) Sriyono (kemudian Serka Heru Santoso) oleh Diki dkk. yang dilandasi jiwa korsa.

Pengejawantahan jiwa korsa ini bisa diamati dalam kisah Sertu Tri Juwanto dan

Serda Ucok Simbolon. Sertu Tri Juwanto mengungkapkan bahwa secara pribadi dia terganggu dengan berita yang menimpa Sertu Sriyono.¹² Serda Ucok Simbolon juga mengaku bahwa Sertu Sriyono adalah sahabat sejatinya, selain itu Ucok merasa kesatuannya dilecehkan.¹³ Pelecehan Sriyono berarti pelecehan korps, kesamaan arti keduanya memunculkan emosi—yang dianggap wajar karena didahului jiwa korsa—lalu meluap jadi agresi yang destruktif. Seorang prajurit mesti memegang teguh jiwa korsa, yang tidak sama artinya dengan *memegang teguh hukum yang berlaku*.

Istilah keistimewaan dan jiwa korsa yang ditafsirkan oleh gerakan pendukung pembantaian Cebongan dengan demikian melegitimasi dan membalikkan gagasan mengenai kriminalitas. Ancaman dari musuh yang sama, yakni Diki dkk., menjadikan pembantaian ini suatu hal yang mulia baik bagi Kopassus maupun gerakan elemen masyarakat Yogyakarta yang mendukungnya. Pembantaian ini justru menjadi cara memberikan pelajaran bagi orang-orang yang tidak bisa diatur sehingga kegusaran para pendukung pembantaian bisa terpuaskan.

Keadaan yang menunjukkan bahwa pembantaian ini adalah sesuatu yang mulia, oleh Ruth Stein disebut sebagai kondisi perkecualian (*state of exception*) dikarenakan adanya *superlaw* (hukum di atas hukum).¹⁵ Kondisi perkecualian ini memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum, solidaritas, maupun hak asasi manusia. Pembantaian menjadi bukan lagi sekadar pembantaian, melainkan sebuah cerita kepahlawanan yang dielu-elukan.

Namun, mengapa pemahaman bahwa sebuah pembantaian adalah pelanggaran terhadap HAM justru dinafikan? Dalam tubuh TNI sendiri, sejarah buruk pelanggaran HAM menjadi persoalan yang sampai saat ini senantiasa diperdebatkan. Meskipun penghormatan terhadap HAM juga mulai tertanam di TNI, namun pandangan bahwa HAM menjadi musuh utama TNI juga masih hadir. Seorang anggota Kostrad mengatakan bahwa 'musuh utama kami [TNI] adalah HAM';¹⁶ atau Kapten Kopassus yang berziarah ke makam Jenderal Sudirman mengatakan kepada seorang anggota gerakan pro-Kopassus bahwa mereka dididik untuk membunuh, namun demi kepentingan orang banyak. Dalam pengertian ini, ada gagasan yang tampak tumpang-tindih: "jangan membunuh, kecuali demi kepentingan orang banyak." Dengan kata lain, "membunuh boleh-boleh saja, *asal* dibutuhkan oleh sebagian besar anggota masyarakat."

Beberapa anggota gerakan pro-Kopassus menyampaikan bahwa mesti ada pemisahan antara HAM dan kepentingan keistimewaan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa HAM memang menjadi isu yang penting.¹⁷ Bahkan ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila sempat diusir dari Yogyakarta karena menyatakan bahwa pembantaian tersebut bertentangan dengan HAM. Hal tersebut menunjukkan adanya penarikan diri dari para pendukung Kopassus, bahwa ada suara lain yang dengan sengaja ditekan supaya tidak lagi menimbulkan kebimbangan (*disavowal of an uncomfortable proximity*).¹⁸ Mangkirnya suara lain (dan berisik!) ini membentuk penyangkalan bahwa apa yang menjadi pengetahuan bersama tidak perlu diketahui



(*fetishistic disavowal*). Lantas, gerakan pro-Kopassus sebenarnya mengetahui telah terjadi pelanggaran HAM, namun karena tidak mau tahu kalau mereka tahu, maka mereka bertindak seolah-olah mereka tidak tahu.¹⁹ Ke-tidak-mau-tahu-an ini boleh jadi sebagai dampak dari adanya musuh bersama dan mengikuti logika jiwa korsa yang dilakukan oleh pelaku pembantaian. Dengan tidak-mau-tahu, maka penciptaan rasa kapok terhadap preman yang dianggap menganggu Yogyakarta dapat terartikulasikan.

Apabila diperhatikan, hubungan antara Kopassus dengan gerakan pro-Kopassus ini layaknya penonton dengan pemain ketoprak. Proses pengadilan para pelaku pembantaian diperlakukan layaknya pertunjukan drama dengan ritual yang penuh sorak-sorai perayaan pembantaian. Perayaan dan ritual dukungan dilakukan bukan hanya di jalanan, melainkan juga di dalam persidangan dengan saksi dari beberapa pihak yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pembantaian.²⁰ Berbeda dengan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI (FKPPI), Pemuda Pancasila (PP), atau Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) yang memang melibatkan pihak militer dalam pembentukannya, Sekber

Elemen masyarakat sipil (paramiliter) yang menjadi perangkat dukungan bagi Kopassus dalam sidang pembacaan vonis terdakwa kasus pembantaian Cebongan.

Dok: A. Harimurti

Keistimewaan merupakan elemen masyarakat yang berdiri atas dasar kepentingan keistimewaan. Artinya, hubungan antara Sekber dengan Kopassus lebih lentur dan bisa renggang kapan saja. Beberapa anggota Sekber bahkan lahir dari aktivis yang anti-rezim militer Orde Baru. Boleh jadi, dalam momen selanjutnya, Sekber berada di pihak yang bertentangan dengan Kopassus, tapi mungkin saja pertalian berbasis kepentingan yang sama kembali terjadi.

Penciptaan hubungan ini juga terjadi lewat ziarah yang secara khusus terjadi dalam rangkaian pembantaian Cebongan. Pada tanggal 18 Juni 2013, 12 tersangka dipindahkan dari Mako Denpom IV/5 Semarang ke Denpom IV/2 di Jalan Magelang. Pada hari yang sama, para prajurit Kopassus melakukan ziarah ke makam Jenderal Sudirman di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara. Tidak hanya prajurit, gerakan pro-Kopassus juga turut serta dalam peziarahan ini. Menurut para prajurit, ziarah dilakukan sebagai wujud solidaritas dan dukungan morel. Ziarah merupakan salah satu strategi politik dengan tujuan yang sangat beragam. Pada zaman Soekarno, ziarah menjadi “praktik populer untuk mengenang dan menghormati korban-korban perang kemerdekaan.”²¹ Karena perang kemerdekaan yang terjadi tidak terpusat, maka ziarah dilakukan di lingkup komunitas lokal di mana pejuang anticolonial dimakamkan. Tujuannya adalah “membawa ke permukaan suatu penyatuan secara nasional melalui simbol-simbol baru.” Tujuan tersebut akan sangat berbeda dengan ziarah yang terpusat seperti di Lubang Buaya, Kalibata, atau

Kusumanegara, yang arahnya adalah “mendominasi simbol-simbol kekuasaan.”²² Ziarah adalah ritual yang “merepresentasikan mode memori untuk menciptakan suatu arti komunitas.”²³ Dengan ziarah, maka ingatan dapat terorganisasi dan membentuk ingatan bersama dalam anggota komunitas yang mengingat.

Cara menggunakan simbol kekuasaan lewat ziarah ke makam Jenderal Sudirman ini menunjukkan bahwa figur-figur nenek moyang ini sebenarnya tidak mati atau lebih tepatnya tidak bisa mati. Mereka hanya ada berada di suatu tempat yang “tidak di sini” namun sewaktu-waktu bisa dipanggil ulang. Pemanggilan ulang lewat ziarah ini diharapkan akan meringankan hukuman para pelaku, dengan pengandaian figur kematian ini memiliki kuasa untuk mengubahnya. Di sinilah pembalikan fetisistik terjadi; bukan kenyataan bahwa figur kematian yang salah dimengerti, melainkan fantasi mengenai figur kematian ini yang menyusun kenyataan.²⁴ Dalam hal ini, fantasi membangun sebuah dunia di mana figur kematian tidak melakukan apa pun untuk memperingan hukuman, namun, meskipun demikian mereka diyakini akan melakukannya.

Singkat kata, pembantaian ini dielu-elukan karena Yogyakarta dianggap berada dalam kondisi perkecualian. Kondisi perkecualian ini memungkinkan pihak otoritas Kopassus sebagai institusi negara masuk sebagai pahlawan. Masuknya jejaring otoritas ini menjadikan kekuasaan lama semakin ditegaskan, yakni dengan cara menjaga tatanan tetap stabil dan mewujudkan ketertiban. Demi kepentingan tatanan

keamanan dan ketertiban tersebut, maka pengetahuan mengenai HAM tidak lagi penting, bahkan orang mesti abai atau tidak-mau-tahu soal HAM. Lebih penting adalah tatanan tetap tersusun rapi. Di sinilah masalah utama muncul: orang menjadi tidak malu untuk membela pembantaian. Sebenarnya, tidak-mau-tahu atau tidak-tahu-malu?

¹ Tulisan ini dicuplik dari bagian tesis berjudul "Merayakan Pembantaian Preman: Fantasi dalam Penyerangan Lapas Cebongan" (2017), Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma.

² Siegel menyebutkan bahwa Petrus merupakan neologisme dari penembak(an) dan misterius. Benedict Anderson menyebutnya sebagai "A grim joke of the time called the soldiers-in-mufti death-squads Petrus—as in St. Peter—an acronym derived from *Penembak Misterius*, Mysterious Killers." Lihat dalam James T. Siegel, *A New Criminal Type in Jakarta: Counter-Revolution Today* (Durham, NC: Duke University Press, 1998), hal. 104; juga dalam Benedict Anderson, "Petrus Dadi Ratu", dalam *Indonesia, Volume 70* (October 2000), hal. 5.

³ '*Njawani*' (mirip orang Jawa) berarti telah relevan untuk menjadi orang Jawa atau kualitas kejawaannya tidak lagi perlu dipertanyakan. Penyebutan '*njawani*' menunjukkan bahwa Jawa asli tidak benar-benar ada, yang ada hanya mendekati Jawa.

⁴ Wawancara dengan Subjek 1.

⁵ Lihat dalam Seksi Statistik Ketahanan Nasional & Bidang Statistik Sosial, *Statistik Politik dan Ketahanan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta 2014* (Yogyakarta: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2015), hal. 10.

⁶ Ruth Stein, *For Love of the Father: A Psychoanalytic Study of Religious Terrorism* (Meridian: Crossing Aesthetics) (California: Stanford University Press, 2010), hal. 108.

⁷ Istilah 'Jiwa Korsa' menjadi populer dalam wacana pembantaian Cebongan setelah sidang tanggal 20 Juni 2013. Mereka berteriak bahwa yang dilakukan para terdakwa tidak terencana seperti dakwaan. "Yang dilakukan para terdakwa disemangati jiwa korsas," kata salah seorang anggota ormas. Jiwa korsas adalah solidaritas kelompok yang ditanamkan dalam pendidikan kemiliteran untuk saling melindungi dan membantu bahkan hingga mempertaruhkan nyawa. Lihat dalam Jun Honna, *Military Politics and Democratization in Indonesia* (Oxon & New York: RoutledgeCurzon, 2003), hal. 65.

⁸ Dalam fantasi, intoyeksi berarti perubahan kualitas objek luar untuk kemudian diinternalisasi ke dalam diri subjek. Lihat dalam J. Laplanche & J.B. Pontalis, *The Language of Psychoanalysis* (London: Hogarth, 1967), hal. 229.

⁹ *Ibid.*, hal. 110.

¹⁰ TB Hasanudin dalam <http://www.viva.co.id/ramadan2016/read/403014-jiwa-korsa-kopassus-apa-itu>. Lihat juga kesaksian dalam johanheru.blogspot.com oleh seorang saksi pembunuhan di Hugo's Café yang justru mempertanyakan semangat solidaritas. Dalam perkelahian di Hugo's Café diceritakan bahwa Serka Heru datang bersama empat orang lainnya yang kemudian meninggalkan Serka Heru sendiri.

¹¹ Dalam persidangan pembantaian Cebongan ini dikatakan tidak terencana, namun akan sulit untuk mempercayainya apabila mendengar isu mengenai prajurit Kopassus yang lima hari sebelumnya bersiap datang ke Yogyakarta dan ada pertemuan antara Pangdam dengan Kapolda.

¹² *Kedaulatan Rakyat*, 18 Juli 2013, "Saksi Kasus Cebongan: Penyerangan Didasari Jiwa Korsas".

¹³ *Tribun Jogja*, 24 Juli 2013, "Serda Ukok Mengaku Menyesal".

¹⁴ Dalam cerita keseharian masyarakat Indonesia (Jawa khususnya), adalah wajar untuk memberi pelajaran kepada pencuri atau kriminal lain dengan cara menyiksa/menghukum seberat-beratnya untuk membuat kapok. Pola demikian juga muncul dalam perayaan pembantaian Cebongan.

¹⁵ Stein, 2010, *Op.Cit.*, hal. 121.

¹⁶ Lihat juga dalam Douglas Kammen, "Where are They now?: The Careers of Army Officers who Served in East Timor, 1998-99", dalam *Indonesia, Number 94, October 2012*, hal. 111-130. Kammen menuliskan bahwa: *Colonel Burhanudin Siagian, who was the district military commander in Bobonaro in 1999, was appointed sub-regional military commander of Abefura, Papua, where further reports of human rights abuses have surfaced. In defense of his hard-line approach to the Free Papua Organization, Siagian is reported to have stated publicly "[w]hat is absolutely certain is that anyone who tends towards separatism will be crushed by TNI," adding, "we are not afraid of human rights."*

¹⁷ Wawancara dengan Subjek 1 dan Subjek 2. Meskipun demikian, dalam wawancara dengan Subjek 3, dari Laskar Srikandhi, dikatakan bahwa Subjek 2 tidak menyetujui penggunaan kekerasan.

¹⁸ Žižek, S. (2013). *For They Know not What They Do*. London & New York: Verso, hal. 660. Dalam obrolan dengan seorang prajurit Kostrad, ia mengatakan mengatakan bahwa "musuh kami ya cuma HAM."

¹⁹ Lihat dalam Slavoj Žižek, *Violence* (New York: Picador, 2008), hal. 53. Lihat juga Slavoj Žižek, *The Sublime Object of Ideology* (London and New York: Verso, 1989), hal. 32.

²⁰ Dalam wawancara dengan Subjek 4: FKPM Paksi Katon ditugasi untuk menjaga persidangan, Subjek 4 mengatakan demikian, "Mengapa Paksi Katon yang dipilih? Padahal ada FKPPi yang lebih besar? Kalau tentara atau polisi nanti dikira mempengaruhi persidangan." Dalam tradisi militer di Indonesia, model ini disebut dengan *proxy war*.

²¹ Klaus H. Schreiner, "Nenek Moyang Nasional", dalam Henri Chambert-Loir & Anthony Reid (Ed.), *Kuasa Leluhur: Nenek Moyang, Orang Suci, dan Pahlawan di Indonesia Kontemporer* (Medan: Bina Media Perintis, 2002), hal. 375.

²² *Ibid.*, hal. 377.

²³ *Ibid.*, hal. 375. Lihat juga tulisan Victor Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure* (Ithaca: Cornell University Press, 1991), hal. 94-130.

²⁴ Slavoj Žižek, *Sublime Object of Ideology* (London & New York: Verso, 2009), hal. 9.

YAYASAN
BIENNALE
YOGYAKARTA



Pemerintah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dinas Kebudayaan

